

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, S.H., M.H. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Adinda Rati Manjari, S.H. *Penerapan likuidasi Pajak Penghasilan Oleh Notaris/PPAT Atas Jabatan dan Tugasnya di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Bambang Sugeng & Sujayadi., *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Edisi Pertama*, Cetakan I, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Burhan Bungin., *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu - Ilmu Sosial lainnya*, Cetakan Kesembilan, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Cekli Setya Pratiwi,dkk., 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.
- Edi Abdullah.,*Hukum Kepolisian Presisi*, Cetakan Pertama, Deepublish Digital Budi Utama, Yogyakarta, 2023.
- Fadli,Zul., *Hukum Akta Notaris*, Cetakan I, Jambi, Penerbit Lingkar Kenotariatan, 2020.
- G.H.S Lumban Tobing, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014.
- Ghofur Abdul., *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*,.Cetakan Pertama, UII Press,Yogyakarta, 2009.
- Guse Prayudi., *Seluk Beluk Perjanjian Yang Penting Untuk Diketahui Mulai Dari A-Z*, Cetakan Pertama, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2007.
- Guastian Djuanda & Irwansyah Lubis., *Pelaporan Pajak Penghasilan*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- HS,Salim., *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT)*, Edisi 1 Cetakan 2, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Isorah, *Perpajakan*. Jilid Pertama. Terbitan ke-1.Yogyakarta.UNY Press.2012.
- I Gede Yusa,dkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2016.
- I Made Hendra K., *Problematic Notaris Dalam Praktik*, Penerbit Alumni, 2021.

Iwan Sidharta., *Pengantar Perpajakan*, Cetakan Kedua, Diandra Kreatif, Yogyakarta, 2021.

Judisseno Rimsky K., *Perpajakan*, Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Kadarudin., *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Cetakan Pertama, Formaci Press, Semarang, 2021.

Laurensius A.S., *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Cetakan Pertama, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2015.

Marjan Miharjo., *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, Cendekia Press, 2021.

Marihot P.S., *Hukum Pajak Formal Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Sengketa, dan Tindak Pidana Pajak*, Cetakan I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Muhammad Djafar Saidi., *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, Edisi 1 - 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Mustofa, *Tuntutan Pembuatan Akta - Akta PPAT*, Cetakan Pertama, Karya Media, Yogyakarta.

Nuryadi Mulyodiwarno., *Menakar Kesetaraan Hak dan Kewajiban Perpajakan di Indonesia*, Cetakan I, Edisi I, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Norma Sari., *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan Pertama, UAD Press, Yogyakarta, 2021

Phaureula Artha W & Emy Iryanie., *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Cetakan Pertama, Deepublish Budi Utama, Yogyakarta, 2018.

Rika Murliasari & La Didi., *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*, Cetakan Pertama, Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Rudy Gunawan B dkk., *Hukum Pajak Indonesia*, Cetakan Pertama, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023.

Rosdiana Haula., *Perpajakan: teori dan aplikasi*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Santoso, Urip., *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cetakan 1, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Sumyar., *Dasar - Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.

Subekti., *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesebelas, PT Intermasa, 1987.

Supeno., *Dasar - Dasar Hukum Perikatan Hukum Perjanjian Pada Umumnya, Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional, dan Perjanjian Dalam Perpektif Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Salim Media Indonesia, Jambi, 2019.

Suryo Dwianto., *Cara Mudah Menghitung Pajak Pribadi*, Cetakan Kedua, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.

Salim & Erlies S.N., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Urip Santoso., *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan Keenam, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2019

Wahyu K., *97 Transaksi Jual Beli Properti*, Cetakan Pertama, Niaga Swadaya, Jakarta, 2015.

Wuryanti., *Administrasi Pajak (PPh Pasal 21)*, Cetakan Pertama, Yayasan Lembaga Gumun Indonesia, Jawa Tengah.

Y.Sri Pudyatmoko., *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, Andi Offset, Yogyakarta, 2002

Tesis

Haryana Hadiyanti., “Implementasi Pasal 32A Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pada PT Goto Gojek Tokopedia TBK”, Tesis, Sarjana Bidang Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2023.

Maria Arindita Kusuma., *Proses Validasi E-BPHTB di Kabupaten Kulon Progo ditinjau Dari Asas Certainty dan Asas Efficiency*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universtas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.

Nadila Marta S., “Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Data Wajib Pajak Dalam Proses Validasi Melalui E-PHTB Notaris/PPAT”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

Jurnal

Adrianto Dwi Nugroho, “Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak Dalam Hukum Acara Perpajakan di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Tahun 2011

Anggita F.P & Suparna W., “Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik : Proposal Untuk Indonesia”, *Jurnal Pajak Indonesia*, Volume 6 Nomor 25, Politeknik Keuangan Negara STAN.

Azalia Delicia D. dkk., Hubungan Hukum Yang Timbul Dalam Penitipan Uang Pajak Jual Beli Tanah Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Jurnal Kentha Semaya*, Volume 11, Nomor 8, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2023.

Bahmid & Sinurat, Arianti Rima., “Implikasi Kebijakan Pengajuan likuidasi Pajak Penghasilan Terhadap Pelaksanaan Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Jurnal Pandecta*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2021.

Dewi Kurnia P & Amin Purnawan., Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4, Universitas Islam Sultan Agung, 2017.

Gede Sastrawan & Ida Ayu P.I.W., Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan), *Jurnal Locus Delicti*, Volume 2 Nomor 1, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2021.

Inggal Ayu N & Ristina Yudhanti., Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Universitas Negeri Semarang, 2023.

Melinda, Vinna., “Pendampingan Perancangan Alur Proses likuidasi Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Andreas Timphthy, S.H., M.Kn. di Kota Batam”, *Jurnal Conference on Community Engagement Project*, Volume 1, Nomor 1, 2021.

Mustofa Abdul Basir, dkk., Peran dan Tanggungjawab Notaris/PPAT dalam Meminimalisasi Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 6, Nomor 3, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Bandung, 2021.

Razif & Rahmawati., Analisis Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional dan Implikasinya pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bireuen), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 5, Nomor 2, Universitas Malikussaleh, Aceh, 2017.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3262.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berkaitan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2022 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Internet

Tim Development e-PHTB Dit.Teknologi Informasi dan Komunikasi KPDJP berjudul “Panduan Penggunaan Aplikasi E-PHTB Notaris PPAT”, <https://id.scribd.com/document/600038406/Panduan-ePHTB-Notaris-PPAT>, diakses pada 5 Oktober 2023.

Website Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (siEMON), https://siemon.kemenkumham.go.id/cari_notaris/kabupaten-sleman/12 , diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.

Website Intranet ATR/BPN “Data PPAT dan PPATS Seluruh Indonesia” <https://intranet.atrbpn.go.id/modulWebsite/daftarPPAT.html> , diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.

Website Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/perpajakan/pph-pasal-22.html>, diakses pada tanggal 22 Februari 2024.

Website Airlangga Law Library., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris sebagai Pelaku Penyelewengan Setoran Pajak BPHTB” oleh A.Wijanarko, https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13340, diakses pada 24 April 2024.

Lainnya

Agung Herning I.P., *Pemberian Kuasa*, Handout Mata Kuliah Teknik Pembuatan Akta 2.

Catatan Pertemuan Pertama Mata Kuliah “Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris dan PPAT” oleh Ibu Iin Suny Atmadja, S.H., M.H., pada 22 Agustus 2022.

Catatan Mata Kuliah “Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah” oleh Bapak Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

Ikhwan Catur R & Eko Susanto., Seminar Nasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berjudul “e-PHTB dan e-BPHTB pada Proses Validasi Pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan”, Magister Kenotariatan, 18 November 2023.